

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pelatihan berbasis kompetensi menekankan pada penguasaan standar kemampuan kerja yang terukur dan diakui oleh industri. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP, 2017) menyatakan bahwa “pelatihan berbasis kompetensi bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi profesional sehingga meningkatkan peluang kerja”. Dengan adanya pelatihan yang sistematis dan terstandarisasi, tenaga kerja diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan program pelatihan kerja tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pendidikan nonformal, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Secara normatif, penyelenggaraan program pelatihan kompetensi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketenagakerjaan nasional maupun kebijakan daerah. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi dan perlindungan kerja. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang mengatur bahwa pelatihan berbasis kompetensi harus disesuaikan dengan standar kebutuhan industri. Selain itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelatihan kerja

harus menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi agar memiliki daya saing di pasar kerja.

Selain regulasi nasional, pelaksanaan pelatihan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Bojonegoro juga didukung oleh kebijakan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 10 dan Pasal 11, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri. Peraturan tersebut juga mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, pelaksanaan program pelatihan sertifikasi K3 di Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari Implementasi kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Pengaturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja juga diperkuat melalui berbagai regulasi teknis ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatur pentingnya keberadaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi K3 di lingkungan perusahaan. Selain itu, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.42/MEN/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor K3 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang keselamatan dan kesehatan

kerja. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja bersertifikasi K3 memiliki posisi penting dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja semakin menegaskan pentingnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai standar nasional. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi K3 akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri dan tuntutan penerapan standar keselamatan kerja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pasca program pelatihan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pelatihan kerja yang dilaksanakan pemerintah daerah benar-benar mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menjawab kebutuhan dunia industri.

Dalam konteks daerah, kebijakan pelatihan kerja juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Keberadaan program sertifikasi K3 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus meningkatkan profesionalisme tenaga kerja. (Suma'mur, 2009) menyatakan bahwa “penerapan standar K3 tidak hanya berfungsi melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas perusahaan.” Oleh karena itu, program pelatihan sertifikasi K3 seharusnya menjadi jembatan

antara kebijakan perlindungan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Namun demikian, keberadaan regulasi yang kuat perlu diikuti dengan implementasi yang efektif agar tenaga kerja bersertifikasi benar-benar dimanfaatkan oleh dunia usaha.

Meskipun program pelatihan kompetensi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, hasil pasca pelatihan menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja bersertifikasi K3 di Kabupaten Bojonegoro masih belum optimal. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan mencapai ribuan unit usaha, namun hanya sebagian kecil yang memanfaatkan tenaga kerja bersertifikasi K3. Dari peserta pelatihan sertifikasi K3 yang telah lulus, hanya sebagian kecil yang berhasil terserap ke dunia usaha dan industri, sementara mayoritas lulusan belum mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program pelatihan dengan realitas penyerapan tenaga kerja di lapangan (Simbolon et al., 2024).

Rendahnya pemanfaatan tenaga kerja bersertifikasi K3 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya penerapan standar K3, lemahnya kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha, serta belum optimalnya sistem penempatan kerja pasca pelatihan. (Simanjuntak, 2001) menyatakan bahwa “penyerapan tenaga kerja tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu tenaga kerja, tetapi

juga dipengaruhi oleh struktur kebijakan dan permintaan industri.” Tanpa dukungan kebijakan yang mendorong perusahaan memanfaatkan tenaga kerja tersertifikasi, program pelatihan berpotensi tidak memberikan dampak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi pasca program pelatihan sertifikasi K3 untuk menilai efektivitas hasil pelatihan, mengidentifikasi kendala penyerapan tenaga kerja, serta menilai peran pemerintah daerah dalam mendorong implementasi K3 di dunia industri.

Kondisi rendahnya penyerapan tenaga kerja bersertifikasi K3 menunjukkan bahwa keberhasilan program pelatihan tidak cukup dinilai dari jumlah peserta yang lulus sertifikasi, melainkan harus diukur dari dampak nyata pasca pelatihan terhadap kesempatan kerja. Program pelatihan yang hanya berorientasi pada output berupa sertifikat tanpa memastikan outcome berupa penempatan kerja berpotensi kehilangan tujuan utamanya. Oleh karena itu, evaluasi pasca program menjadi komponen penting dalam siklus kebijakan pelatihan kerja. (Dunn, 2018) menjelaskan bahwa “evaluasi kebijakan publik berfungsi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program terhadap masyarakat, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.” Tanpa evaluasi yang sistematis, program pelatihan berisiko berjalan sebagai kegiatan administratif rutin yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan pengangguran.

Dalam konteks program sertifikasi K3 di Kabupaten Bojonegoro, evaluasi pasca pelatihan diperlukan untuk menilai keterkaitan antara hasil pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Tenaga kerja

bersertifikasi K3 seharusnya menjadi aset penting bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Suma'mur (2009) menegaskan bahwa penerapan K3 yang baik tidak hanya melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Kebutuhan terhadap tenaga kerja bersertifikasi K3 di Kabupaten Bojonegoro juga cukup relevan mengingat berkembangnya sektor industri dan migas di daerah tersebut. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro (2024), terdapat puluhan perusahaan skala menengah dan besar yang telah menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya pada sektor migas, manufaktur, konstruksi, dan jasa penunjang industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi K3 sebenarnya cukup tinggi. Namun apabila tenaga kerja bersertifikasi tidak dimanfaatkan secara optimal, maka potensi manfaat program pelatihan menjadi tidak maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pasca pelatihan, termasuk sistem penempatan kerja, kemitraan dengan perusahaan, serta peran pemerintah daerah dalam mendorong implementasi standar K3.

Namun demikian, keberhasilan suatu program pelatihan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari sejauh mana lulusan pelatihan tersebut dapat terserap di dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan data mengenai jumlah peserta pelatihan serta jumlah lulusan yang telah bekerja setelah mengikuti pelatihan. Berikut disajikan data peserta

pelatihan sertifikasi K3 tahun 2025.

TABEL 1
DATA PESERTA PELATIHAN SERTIFIKASI K3 TAHUN 2025

No.	Program Pelatihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Peserta	Jumlah yang Sudah Bekerja
1.	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Paket 1	22	18	40	4
	Jumlah	22	18	40	4

Sumber: Data diolah peneliti dari Rekap Data Pelatihan Sertifikasi K3 Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah peserta pelatihan sertifikasi K3 tahun 2025 sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 22 peserta laki-laki dan 18 peserta perempuan. Seluruh peserta telah mengikuti pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro di UPT BLK Bojonegoro. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar memiliki sertifikat keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Namun demikian, dari total 40 peserta pelatihan, hanya 4 orang yang telah berhasil bekerja setelah mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan pelatihan masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja dengan realitas di lapangan, dimana sebagian besar lulusan belum terserap di dunia usaha dan

industri.

Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja bersertifikasi K3 menunjukkan bahwa program pelatihan belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesempatan kerja. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya keterhubungan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, belum optimalnya sistem penempatan kerja pasca pelatihan, serta rendahnya pemanfaatan tenaga kerja bersertifikasi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan program pelatihan sertifikasi K3.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, diketahui bahwa jumlah peserta pelatihan sebanyak 40 orang yang terdiri dari peserta laki-laki dan perempuan. Seluruh peserta telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan sertifikat yang dapat digunakan sebagai syarat dalam memasuki dunia kerja, khususnya pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Sementara itu, sebanyak 36 orang lulusan atau sekitar 90% dari total peserta pelatihan masih belum bekerja atau belum terserap di dunia kerja, meskipun mereka telah memiliki sertifikasi kompetensi K3. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan pelatihan yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di dunia usaha dan industri.

Perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah lulusan sertifikasi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program pelatihan dengan realitas penyerapan tenaga kerja di lapangan. Program pelatihan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus meningkatkan peluang kerja bagi peserta pelatihan. Namun berdasarkan data yang ada, keberhasilan program pelatihan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja

Menurut Payaman J. Simanjuntak, 2001, belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja berlisensi K3 dipengaruhi oleh sejumlah hambatan. Faktor-faktor tersebut meliputi minimnya sinergi antara lembaga pelatihan dan industri, terbatasnya akses informasi tenaga kerja, serta rendahnya komitmen dan kesadaran perusahaan dalam menerapkan standart keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja

Selain itu, belum adanya sistem penempatan kerja atau *job placement* yang efektif setelah pelatihan juga dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja lulusan pelatihan.

Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut melalui penelitian mengenai Evaluasi Pasca Program Pelatihan Kompetensi Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi

pemanfaatan tenaga kerja bersertifikasi K3 di dunia usaha dan industri (Stufflebeam, 1966).

(Simanjuntak, 2001) menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kebijakan pasar kerja dan struktur ekonomi daerah. Dengan demikian, rendahnya penyerapan lulusan sertifikasi K3 tidak semata-mata disebabkan oleh kualitas tenaga kerja, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan kebijakan dan permintaan industri. (Stufflebeam, 2003) menegaskan bahwa evaluasi program harus dilakukan secara komprehensif agar mampu menggambarkan kebutuhan, pelaksanaan, dan dampak program secara menyeluruh. Pendekatan evaluasi yang sistematis memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi yang akurat mengenai efektivitas program, kendala implementasi, serta peluang perbaikan kebijakan. (Daniel L. Stufflebeam, 1966). Oleh karena itu, evaluasi pasca program pelatihan sertifikasi K3 di Kabupaten Bojonegoro menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program pelatihan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja dan dunia industri. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif, sehingga program pelatihan tidak hanya menghasilkan lulusan bersertifikat, tetapi juga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun Program Pelatihan Kompetensi Sertifikasi K3 telah diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan kompetensi pencari kerja, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan maupun yang lulus sertifikasi. Program juga perlu dievaluasi berdasarkan manfaat yang diperoleh peserta setelah pelatihan, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi Program Pelatihan Kompetensi Sertifikasi K3 menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) sehingga dapat diketahui sejauh mana program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan berdasarkan tujuan awal yang dimiliki oleh peneliti yaitu untuk memperoleh data yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pemecah masalah yang ada dalam topik penelitian. Setiap penelitian yang ingin dilakukan harus berdasarkan masalah yang telah ditemukan dalam pencarian informasi awal. Walaupun diakui bahwa masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. (Truckman, 1988). Apabila peneliti menemukan masalah, maka dapat dikatakan peneliti telah melaksanakan separuh dari proses penelitian karena telah ditemukan suatu masalah maka peneliti dapat segera dilakukan oleh peneliti dengan lebih mudah.

Masalah penelitian muncul ketika terdapat kesenjangan antara kondisi

yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam konteks program pelatihan kompetensi sertifikasi K3 di Kabupaten Bojonegoro, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan program yang diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan kondisi nyata yang menunjukkan masih rendahnya pemanfaatan tenaga kerja bersertifikasi K3 oleh dunia usaha dan industri. Jika suatu program telah dilaksanakan namun hasil pasca pelatihan belum memberikan dampak yang optimal, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah yang perlu dikaji melalui penelitian ilmiah. “Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui proses pengumpulan dan analisis data.” (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka penelitian mengenai rendahnya penyerapan tenaga kerja pasca program pelatihan kompetensi sertifikasi K3, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Evaluasi Pasca Program Pelatihan Kompetensi Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bojonegoro?”

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu “agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan Evaluasi Pasca Program Pelatihan Kompetensi Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian administrasi publik yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori mengenai evaluasi pasca program pelatihan kerja, terutama dalam konteks pelatihan kompetensi sertifikasi K3 dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas evaluasi program pelatihan kerja serta menjadi bahan kajian dalam pengembangan teori mengenai efektivitas kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan.

b. Secara praktis

1) Bagi Mahasiswa

Bahan pertimbangan dan masukan yang lebih baik untuk mahasiswa mengenai penelitian mengenai evaluasi pasca program pelatihan kompetensi sertifikasi K3 dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bojonegoro, serta menjadi referensi untuk pengembangan penelitian sejenis di bidang administrasi publik dan kebijakan ketenagakerjaan.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi peningkatan kualitas Pendidikan dan dapat menambah referensi penelitian dengan topik tentang Evaluasi Pasca Program Pelatihan Kompetensi Sertifikasi K3 dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bojonegoro.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah

i. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

ii. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep yang berkaitan dengan evaluasi program, pelatihan kompetensi, sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penyerapan tenaga kerja. Dalam bab dua ini juga diuraikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian..

iii. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

iv. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai bagaimana Evaluasi Pasca Program Pelatihan Kompetensi Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bojonegoro.

v. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.